



IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG SOSIAL BUDAYA

Haidar M. Alfatih¹, Hidayati Salamah²

^{1,2}STAI Al Aqidah Al Hasyimiyyah Jakarta- Indonesia. Email: haidar.malfatih@gmail.com

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Keyword:

Pancasila, Sosial Budaya,
Kebijakan

Abstract: Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan social dan berbudaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan bersosial budaya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya, dilakukan dengan cara toleransi terhadap sesama serta mementingkan kepentingan bersama. Penerapan pancasila dalam sosial budaya ini merupakan dasar untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Dengan sosial budaya, Indonesia menjadi memfokuskan seluruh masyarakat Indonesia memahami perbedaan dan keragaman budaya Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta yaitu pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan social dan berbudaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara yuridis-konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup berbangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Perlu untuk melakukan studi terkait pemahaman apa itu Kebijakan Sosial Budaya dan bagaimana Implementasi Pancasila dalam bidang kebijakan Sosial Budaya.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Implementasi

Implementasi mempunyai begitu banyak pengertian. Salam satunya Implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Implementasi juga dapat diartikan dengan tindakan yang dilakukan baik individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Pengertian Kebijakan Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan salah satu tatanan bagian terkecil dari suatu masyarakat dalam hidup bersama. Dalam tatanan hidup bermasyarakat, sosial budaya sangat diperlukan karena untuk membentuk kerukunan dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya saat ini telah menimbulkan permasalahan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹ Kebijakan sosial

¹ Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram , 3 (1), 620-628.

adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik² yang merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.³ Kebijakan sosial juga adalah ketetapan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak warga negaranya.⁴ Dalam hal lainnya, kebijakan sosial dapat dikatakan sebagai sebuah aspek sosial, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial.⁵ Kebijakan sosial adalah prinsip-prinsip, prosedur dan tata cara dari undang-undang yang telah ada, sebagai panduan administrasi dan regulasi pada lembaga yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.⁶ Masyarakat memiliki sistem sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakatlainnya. Sosial budaya merupakan perpaduan antara sistem sosial dan sistem budaya, Manusia dalam masyarakat dapat menghasilkan dan mengembangkan unsur budaya melalui relasi sosial untuk mewujudkan pelaksanaan dan perkembangan masyarakat dalam pencapaian hidup melalui sosial budaya.

Dalam konteks sosial budaya masyarakat lebih menyukai individualis dantidak suka berkumpul. Tetapi dengan adanya pancasila sebagai dasar negara, masyarakat menyadari bahwa manusia harus hidup secara berdampingan dan saling peduli satu samalain. Hal itu sesuai dengan sila ke-3 pancasila yaitu persatuan Indonesia. Tanpa adanya sosial budaya dalam masyarakat, kehidupandi masyarakat pasti akan mengalami individualis dan saling bersaing secara tidak manusia. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat, sosial budaya sangat penting baik diterapkan di lingkungan keluarga,sekolah, politik, dan lain-lain.⁷

3. Arti Pancasila Dalam Kehidupan Sosial dan Budaya

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai dan norma adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Soekarno mendeklarasikan Pancasila sebagai landasan, falsafah hidup atau jiwa. Presiden Soekarno juga menyampaikan pandangannya bahwa sebelum Indonesia merdeka, pondasi bangsa Indonesia harus ditegakkan di dalam hati dan jiwa bangsa Indonesia. Dasar Pancasila berkaitan dengan hal-hal yang mengakar dalam pada seluruh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara memuat lima prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme(kemanusiaan), musyawarah/perundingan, kesejah-teraan (keadilan sosial) dan ketuhanan yangtertinggi. Pancasila adalah jiwa negaraIndonesia yang tidak bisa ditemukan dinegara lain. Sebagai dasar negara, kita tentu bisa menerapkan banyak peran. Pancasila mengajarkan makna yang sangat penting, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat di implementasikan dalam kehidupan social dan budaya masyarakat Indonesia, maka akan berdampak signifikan bagi bangsa Indonesia. Namun sayangnya, pengimplementasian Pancasila kini jarang terlihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Selama bertahun-tahun, Sosial Budaya semakin berkurang dan sedikit yang mencerminkan budaya Indonesia seperti tolong menolong, rukun, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Namun, dalam kehidupan sosial budaya sekarang ini lebih kearah individualis. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang beragam, Bangsa Indonesia iniharus bersatu dan menghargai perbedaan walau berbeda dari segi ekonomi maupun jabatan.

² Edi Suharto. 2011. Kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta. Hal 10,11

³ ibid

⁴ ibid

⁵ Edi Suharto. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: LSP STKS. Hal 107,108,109,110,111,112,113,114,115.

⁶ Encyclopedia Of Social Work. Washington, DC: NASW PRESS. Hal 227.

⁷ Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram , 3 (1), 620-628.

⁸ Ali, A. (2009). Negara Pancasila JalanKemaslahatan Berbangsa. Jakarta: PustakaLP3ES

Keberadaan perbedaan tersebut sering di jadikan sebagai faktor dan alasan untuk memecah belah Negara Indonesia. Perbedaan yang ada di jadikan sebagai ancaman antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Memudarnya rasa nasionalisme terhadap bangsa kini juga sudah dirasakan. Namun, jika warga Indonesia memahami Bhineka Tunggal Ika, memahami makna Pancasila dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tidak akan ada perbedaan dan perpecahan dinegara Indonesia. Implementasi semacam ini mungkin menjadi alasan mengapa Pancasila menetapkan nilai-nilainya untuk mendorong warga negara mengedepankan persatuan dalam perbedaan.⁹

4. Implementasi Pancasila Dalam Kebijakan Sosial dan Budaya

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya di dasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai social budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejala yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik.¹⁰

Oleh karena itu dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal , 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, dan persatuan yang massing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. PASAL 29, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. PASAL 31, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. PASAL 32, Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat indonesia harus diwujudkan dalam ptoses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di indonesia. Dengan demikian, pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arh bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya indonesia yang beradab, sesuai dengan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradap.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa Pancasila memiliki keterkaitan yang erat dengan sosial budaya. Dengan bersosial budaya kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga Indonesia, kita danjurkan untuk

⁹ Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 1.

¹⁰ Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10.

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya, dengan cara toleransi terhadap sesama serta mementingkan kepentingan bersama. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi yang berkualitas, yaitu dengan cara meningkatkan SDM yang menjunjung tinggi serta bermartabat bagi persatuan dan kesatuan. Penerapan pancasila dalam sosial budaya ini merupakan dasar untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju. Dengan sosial budaya, kita perlu memfokuskan seluruh masyarakat Indonesia memahami perbedaan dan keragaman budaya Indonesia. Pengimplementasian nilai pancasila tersebut dapat dimulai dari diri sendiri seperti menghargai, menghormati perbedaan antar suku dan ras, memperlakukan manusia lainnya sebagai makhluk tuhan sesuai dengan HAM, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kelompok, menjunjung tinggi nilai sosial kemasyarakatan, sikap hidup rukun, dan gotong royong.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* , 3 (1), 620-628.
- Edi Suharto. 2011. Kebijakan sosial. Bandung: Alfabeta. Hal 10,11
- Edi Suharto. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: LSP STKS. Hal 107,108,109,110,111,112,113,114,115.
- Encyclopedia Of Social Work. Washington, DC: NASW PRESS. Hal 227.
- Aminullah, A. (2018). Implementasi Nilai- Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* , 3 (1), 620-628.
- Ali, A. (2009). Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10.
- PASAL 27 (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. PASAL 33 (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. PASAL 34 (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.